

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT, DAN PENILAIAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Litasari¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Rostin²⁾ dan **La Ode Anto**²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ; 1) pengaruh inventarisasi aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur; 2) pengaruh legal audit aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur; 3) pengaruh penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur, dan; 4) pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara bersama-sama terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah petugas Bendahara Aset/Barang serta Pemeriksa Barang pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 4 (empat) orang, sehingga total keseluruhan sampel yang dipilih berjumlah sebanyak 116 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai $F_{hitung} (7,256) > F_{tabel} (2,71)$ dan nilai sig. $(0,000) < \alpha (0,05)$. Adapun secara parsial inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dan Penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,473. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel bebas (Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset) terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap adalah sebesar 0,473 atau 47,3%, sedangkan sisanya yaitu 52,7% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini, misalnya kinerja pegawai, target kerja, perencanaan, dan lain-lain

Kata Kunci: Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset Tetap.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze; 1) the effect of asset inventory on optimizing the utilization of fixed assets of the East Kolaka Regency Government; 2) the effect of legal audit of assets on the optimization of utilization of fixed assets of the Regional Government of the East Kolaka Regency; 3) the effect of asset valuation on optimizing the utilization of fixed assets of the East Kolaka Regency

Government, and; 4) the influence of asset inventory, legal audit, and asset valuation together towards optimizing the utilization of fixed assets of the East Kolaka Regency Government. The type of research used in this study is causality research with a quantitative approach. The samples in this study were Asset / Goods Treasurer officers and Goods Inspectors in each SKPD in the scope of the Regional Government of East Kolaka Regency as many as 4 (four) people, so that the total number of selected samples amounted to 116 peoples.

The results of this study indicate that simultaneous inventory of assets, legal audit, and assets valuation together have a positive and significant effect on optimizing the utilization of fixed assets of the Regional Government of East Kolaka Regency with a value of $F\text{-count} (7.256) > F\text{ table} (2.71)$ and $\text{sig.} (0,000) < \alpha (0.05)$. The partial asset inventory has a positive and significant effect on the Optimization of Fixed Asset Utilization in the District Government of East Kolaka, audit law has a positive and significant effect on optimizing the use of fixed assets in the Regional Government of East Kolaka Regency, and asset valuation has a positive and significant effect on optimizing the use of fixed assets to the Regional Government of the Regency of East Kolaka. The magnitude of the coefficient of determination is 0.473. This means that the contribution of the independent variable (Asset Inventory, Asset Legal Audit, and Asset Assessment) to the Optimization of Fixed Asset Utilization is 0.473 or 47.3%, while the remaining 52.7% is the influence of other variables not included in the study this, for example employee performance, work targets, planning, and others.

Key word: Inventory of Asssets, Legal Audit, Asset Valuation, Optization of Fixed Assets.

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak salah satunya pada pengelolaan aset, dimana terjadinya pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan aset daerah yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah melalui pemanfaatan dari aset-aset yang ada, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset tersebut. Sebaliknya, aset daerah yang tidak dimanfaatkan dengan optimal, maka akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan.

Pengelolaan aset daerah dianggap penting karena merupakan salah satu dari kunci

keberhasilan dari pengelolaan ekonomi daerah. Selain itu, banyaknya tuntutan masyarakat terhadap manfaat fasilitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk memuaskan dan mensejahterakan masyarakatnya, kesiapan sarana dan prasarana pendukung sangat diperlukan. Adapun sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Barang daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang

bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Bab I Pasal 1).

Mahmudi (2010) mendefinisikan barang atau aset milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Menurut Siregar (2004), terdapat beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna untuk dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki suatu daerah yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dimana jika kelima tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Menurut Siregar (2004), sampai saat ini masih terdapat banyak masalah dalam pengelolaan aset daerah. Salah satu masalah utama pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang aset. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus benar-benar memahami apa sajakah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam hal ini adalah aset tetap tanah dan bangunan.

Permasalahan yang menjadi fenomena dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dimana masih kurangnya memperhatikan sisi strategis manajemen aset daerah dalam perspektif pengelolaan pemerintahan yang baik. Munculnya masalah dalam pengelolaan aset daerah disebabkan karena

inventarisasi dan identifikasi aset secara fisik, penguasaan secara yuridis, dan penilaian potensi aset yang dimiliki belum sepenuhnya terlaksana, sehingga basis data aset daerah belum tersusun dengan baik. Hal ini berimplikasi pada pemanfaatan aset daerah yang belum efektif dan efisien. Terlebih setelah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka Timur dari Kabupaten Kolaka serta adanya lintas SKPD yang mengalami merger, kejelasan pemilikan dan pengolaan aset masih menjadi kendala dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah Daerah harus mampu memahami dan mengembangkan tujuan utama dari pengelolaan aset daerah yaitu terjadinya optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan atau mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan untuk mencapai pemenuhan pelayanan yang optimal untuk masyarakat sebagai pelayan publik. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, dimana cukup banyak aset daerah belum dijadikan sebagai aset yang produktif dalam menghasilkan pendapatan, tetapi masih dikelola seadanya sebatas hanya pencatatan akuntansi sebagai penambah dalam total aset daerah. Bukannya menghasilkan pendapatan, justru aset-aset tersebut membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar. Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang "idle" (tidak digunakan) menyebabkan ketidakefisienan bagi pengelola. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pemahaman Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah secara utuh untuk manajemen aset daerah, kurangnya pemeliharaan, serta masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut : (1) apakah inventarisasi aset berpengaruh terhadap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur?; (2) apakah legal audit aset berpengaruh terhadap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur?; (3) apakah penilaian aset berpengaruh terhadap terhadap optimalisasi

pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur?; (4) apakah inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Kabupaten Kolaka Timur?.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana suatu proses inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah Daerah. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini yakni bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki yang dapat memberikan manfaat finansial dan ekonomi dimasa yang akan datang serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri / menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana / kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan

bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan.

Definisi Aset

Menurut Halim dan Syam (2012), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan, dan diharapkan manfaat tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya.

Klasifikasi Aset ada 2 (dua), yaitu Aset lancar dan Aset non Lancar. Dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk di pakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan kedalam katagori aset tersebut maka dimasukkan ke dalam kategori aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancer meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau untuk masyarakat umum. Aset non lancar

meliputi aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dengan terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Menurut PSAP Nomor 7 berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas aset tetap diklasifikasikan menjadi 5 yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Manajemen Aset Daerah

Manajemen aset menurut Lemer yang dikutip dalam Hidayat (2011) menyatakan bahwa Manajemen aset merupakan proses menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

Sedangkan menurut Siregar (2004), manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, metode, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi keselamatan atau kepatuhan pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan.

Inventarisasi Aset

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Inventarisasi aset terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain. Sedangkan aspek yuridis/legal yaitu status penguasaan masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/ *labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Legal Audit

Menurut Sugiana (2013), legal audit aset adalah pemeriksaan untuk mendapat gambaran jelas dan menyeluruh terutama mengenai status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan, pengalihan aset, mengidentifikasi, kemungkinan terjadi berbagai permasalahan hukum, serta mencari solusi atas masalah hukum tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan. Penguasaan dan pemilikan tanah dan bangunan (*real property*) meliputi semua hak, hubungan-hubungan hukum.

Penilaian Aset

Menurut Sugiana (2013), penilaian aset adalah proses kegiatan penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas

nilai ekonomis suatu properti, baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.

Penilaian aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Proses kerja ini biasanya dilakukan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menetapkan harga bagi aset yang ingin di jual. Melakukan kegiatan penilaian untuk mengetahui nilai pasar (*market value*) atas objek properti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode penilaian yang lazim digunakan dalam pekerjaan penilaian.

Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimalisasi aset yaitu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah disebabkan dari permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

Menurut Siregar (2004), optimalisasi pemanfaatan aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam

strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain

HIPOTESIS PENELITIAN

Adapun hipotesis penelitian yang disajikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur.
2. Legal Audit Aset berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur.
3. Penilaian Aset Berpengaruh Signifikan Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur.
4. Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Berpengaruh Signifikan Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk meneliti pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada 29 SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur yaitu Pengguna Barang (Kepala SKPD), Pengurus Barang SKPD, Kasubag Perencanaan SKPD, dan Pemeriksa Barang SKPD dengan total keseluruhan sebanyak 203 orang. Dengan asumsi bahwa petugas Bendahara Aset/Barang serta Pemeriksa Barang masing-masing SKPD adalah sebanyak 4 (empat) orang, maka total keseluruhan sampel yang dipilih berjumlah sebanyak 116 orang.

4. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum

Kabupaten Kolaka Timur lahir dari semangat juang yang tinggi segenap rakyat Kolaka Timur guna menuju kemandirian wilayah, melalui era otonomi daerah telah dijadikan momentum untuk bangkit dan menggiatkan derap langkah pembangunan daerah guna menggapai kemajuan dan masa depan yang penuh harapan. Dengan kekuatan tripilar yang meliputi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, bahu membahu dan bersinergi dalam segenap upaya pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.

Secara geografis, Kabupaten Kolaka Timur terletak di jazirah Sulawesi Tenggara bagian timur wilayah Kabupaten Kolaka dengan berbatasan sebelah utara dengan Kab. Kolaka Utara dan Konawe Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Bombana dan Kab. Konawe Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Konawe dan Konawe Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kab. Kolaka.

Kabupaten Kolaka Timur memiliki luas $\pm 3.634,74 \text{ km}^2$ dan secara administratif terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan, 16 wilayah

kelurahan, serta 117 desa. Adapun kondisi topografi daerah Kab. Kolaka Timur pada umumnya mempunyai permukaan yang bergunung, bergelombang an berbukit-bukit yang berada pada kemiringan 0 – 2% sampai 40%. Diantara gunung dan bukit-bukit terbentang dataran yang merupakan daerah-daerah potensial untuk mengembangkan sektor pertanian. Adapun jumlah penduduk di Kab. Kolaka Timur adalah sebanyak 128.426 jiwa.

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 116 orang pegawai lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dimana keseluruhan sampel penelitian yang dipilih merupakan Pegawai negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Adapun PNS yang dipilih tersebut adalah Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang, serta Pengurus/Bendahara BMD/Aset Tetap pada 29 SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur, sehingga total sampel secara keseluruhan adalah sebanyak 116 orang.

Berdasarkan pelaksanaan penyebaran kuesioner, diperoleh jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 94 kuesioner dengan item pertanyaan dalam kuesioner telah terjawab secara keseluruhan oleh responden, sehingga jawaban kuesioner yang kembali tersebut dapat dikategorikan layak untuk diolah lebih lanjut dalam rangka melaksanakan penelitian terkait pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Karakteristik Responden

Penelitian tentang pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur dilakukan menggunakan responden yakni Pegawai Negeri Sipil yang merupakan petugas Pemeriksa Barang pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berjumlah 94 orang, sesuai

jumlah kuesioner yang kembali dari hasil penyebaran kuesioner ke 116 responden. Adapun karakteristik dari responden dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4
Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	58	61,7
2.	Perempuan	36	38,3
	Total	94	100

Sumber : Data Primer Diolah 2018

Tabel 5.5
Responden Menurut Umur

No.	Umur (Thn)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	< 26	6	6,4
2.	26 – 30	39	41,5
3.	31 – 35	31	33,0
4.	> 35	18	19,1
	Jumlah	94	100

Sumber : Data Primer Diolah 2018

Tabel 5.6
Responden Menurut Tingkat Pendidikan Akhir

No.	Pendidikan Akhir	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	SMA	11	11,7
2.	Diploma	17	18,1
3.	Sarjana	52	55,3
4.	Magister	14	14,9
	Total	94	100

Sumber : Data Primer Diolah 2018

Tabel 5.7
Responden Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Pejabat	18	19,1
2.	Pengadaan	47	50,0
3.	Pemeriksa Barang Bendahara	29	30,9

	Pengurus Barang		
	Total	94	100

Sumber : Data Primer Diolah 2018

Deskripsi Variabel Penelitian

1. Inventarisasi Aset (X1)

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Inventarisasi Aset (X1) menunjukkan nilai rata-rata skor jawaban 3,92 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan jawaban responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah memiliki kategori penilaian yang baik atas pelaksanaan mekanisme inventarisasi aset tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme inventarisasi aset tetap yang baik akan menghasilkan informasi aset tetap yang relevan dan lengkap sebagai bahan acuan pertanggungjawaban daerah.

2. Legal Audit (X2)

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Legal Audit (X2) menunjukkan nilai rata-rata skor jawaban 3,94 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan jawaban responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah memiliki kategori penilaian yang baik atas pelaksanaan mekanisme penentuan legal audit aset Instansi.

3. Penilaian Aset (X3)

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Penilaian Aset (X3) menunjukkan nilai rata-rata skor jawaban 4,03 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan jawaban responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah memiliki kategori penilaian yang baik atas pelaksanaan mekanisme penilaian aset tetap pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Y)

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Y) menunjukkan nilai rata-rata skor jawaban 4,12 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan

bahwa keseluruhan jawaban responden atas kelima indikator optimalisasi pemanfaatan aset tetap telah berada dalam kategori baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah memiliki penilaian yang baik bahwa optimalisasi pemanfaatan aset tetap dapat terbentuk apabila Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas terkait pengelolaan aset tetap mampu mencatat dan menentukan potensi fisik aset yang dimilikinya, mampu memetakan lokasi masing-masing aset tetapnya, mampu mengukur dan menentukan nilai ekonomi aset tetap tersebut, menghitung jumlah/volume aset tetap secara akurat, serta menetapkan legal kepemilikan aset tetap yang dimiliki dari segi hukum untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan.

Deskripsi Analisis Inferensial

1. Uji Kualitas Data

Data hasil uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner pada masing-masing indikator merupakan pernyataan yang valid dimana dari hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan nilai $r > 0,30$ dengan nilai $\alpha = 0,05$ yang berarti data hasil penilaian kuisisioner merupakan data yang valid sehingga menunjukkan uji validitas terpenuhi.

Hasil uji validitas dan realibilitas juga menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner merupakan pernyataan-pernyataan yang reliabel, dimana diketahui seluruh nilai *Alpha Cronbach* $> 0,60$. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa pernyataan-pernyataan responden dalam kuisisioner yang telah dibuat dapat dijadikan data dalam

penelitian untuk membuktikan pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa angka *tolerance* untuk masing-masing variabel berada di atas 0,10 maka penelitian ini disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selain angka *tolerance*, angka pada VIF juga berada di bawah 10 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tepat untuk dilakukan pengujian karena uji multikolinearitas telah terpenuhi.
- b. Hasil uji heterokedastisitas pada grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.
- c. Hasil uji normalitas menggunakan grafik *Normal Probability Plot* menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi layak dipakai untuk diprediksi dan telah memenuhi asumsi normalitas.
- d. Hasil uji autokorelasi menggunakan asumsi Durbin Watson menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam

penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 36,603 + 0,145X_1 + 0,217X_2 + 0,015X_3 + \varepsilon$$

1. Uji Parsial

- a. Hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} ternyata nilai t_{hitung} (2,406) > t_{tabel} (1,66) dan untuk *probabilitas value* juga dapat dilihat bahwa *p-value* sebesar 0,018 < dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- b. Hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} ternyata nilai t_{hitung} (2,246) > t_{tabel} (1,66) dan untuk *probabilitas value* juga dapat dilihat bahwa *p-value* sebesar 0,027 < dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa Legal Audit berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- c. Hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} ternyata nilai t_{hitung} (2,771) > t_{tabel} (1,66) dan untuk *probabilitas value* juga dapat dilihat bahwa *p-value* sebesar 0,044 < dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa Penilaian berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Uji Simultan

Hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 5.14, terlihat bahwa nilai F_{hitung} (7,256) > F_{tabel} (2,71) dan untuk *probabilitas value* juga dapat dilihat nilai *p-value* (0,000) < α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset secara simultan berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan

3. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yaitu dengan melihat koefisien determinasinya (R^2). Berdasarkan Tabel 5.14 diketahui besarnya nilai $R^2 = 0,473$. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel bebas (Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset) terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap adalah sebesar 0,473 atau 47,3%, sedangkan sisanya yaitu 52,7% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini, misalnya kinerja pegawai, target kerja, perencanaan, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Pengaruh antara Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap dapat dilihat pada koefisien regresinya yaitu 0,145. Nilai positif mengindikasikan terdapat pengaruh positif antara Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel Inventarisasi Aset semakin baik dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap akan semakin baik pula..

Selanjutnya pada hasil analisis regresi linear berganda untuk uji parsial menunjukkan nilai t_{hitung} variabel inventarisasi aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap yakni sebesar 2,406 jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 jauh lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa secara parsial inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi

pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Pengaruh Legal Audit Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Pengaruh antara Legal Audit terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap dapat dilihat pada koefisien regresinya yaitu 0,217. Nilai positif mengindikasikan adanya pengaruh yang positif antara legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada legal audit akan mengakibatkan perubahan kenaikan pada optimalisasi pemanfaatan aset tetap menjadi semakin baik pula.

Selanjutnya pada hasil analisis regresi linear berganda untuk uji parsial menunjukkan nilai t_{hitung} variabel legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap yakni sebesar 2,246 jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 jauh lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa secara parsial legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, maka dapat diartikan bahwa legal audit memegang peranan penting dalam mekanisme pengelolaan aset tetap, dimana legal audit yang dilaksanakan secara tepat dan akurat akan memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh terutama mengenai status kepemilikan aset tetap, sistem dan prosedur penguasaan aset tetap, identifikasi aset tetap, serta mampu mengatasi dan memberikan solusi atas kemungkinan permasalahan hukum yang akan terjadi di kemudian hari atas pengakuan aset tetap tersebut.

Pengaruh Legal Audit Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Pengaruh antara Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap dapat dilihat pada koefisien regresinya yaitu 0,015. Nilai positif mengindikasikan adanya pengaruh yang positif antara penilaian aset terhadap

optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada penilaian aset akan mengakibatkan adanya perubahan kenaikan pada optimalisasi pemanfaatan aset tetap menjadi semakin baik pula.

Selanjutnya pada hasil analisis regresi linear berganda untuk uji parsial menunjukkan nilai t_{hitung} variabel penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap yakni sebesar 2,771 jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 jauh lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa secara parsial penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, maka dapat diartikan bahwa penilaian aset yang dikuasai secara tepat akan memberikan suatu estimasi atas nilai ekonomis suatu aset tersebut dan didukung menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian aset yang berlaku. Penilaian aset tetap yang tepat juga akan menjadi informasi pendukung yang baik dalam rangka memberikan perencanaan akan pemanfaatan aset tetap secara maksimal.

Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Pengaruh antara Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap secara simultan berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan nilai F_{hitung} yakni sebesar 7,625 jauh lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 2,71 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa secara simultan inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, maka dapat diartikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset tetap dapat dilaksanakan apabila dapat didukung dengan adanya inventarisasi aset yang tepat dan

lengkap, didukung dengan adanya legal audit yang kuat, serta disertai dengan adanya penilaian aset secara akurat dan akuntabel. Informasi-informasi yang kuat akan mendukung dalam upaya mengoptimalkan potensi dari aset tetap yang bertujuan menghasilkan nilai dari segi peningkatan pelayanan serta dari segi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur diharapkan untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur diharapkan untuk meningkatkan perhatiannya menyangkut inventarisasi aset yang mencakup inventarisasi fisik maupun inventarisasi legal/yuridis, karena dengan pelaksanaannya maka Pemerintah Daerah dapat mengetahui secara pasti mengenai jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur diharapkan untuk meningkatkan perhatian yang lebih baik lagi menyangkut pelaksanaan penilaian aset karena penilaian aset Barang Milik Daerah harus dilakukan secara periodik oleh pengelola barang dengan melibatkan penilai independen sehingga dapat diketahui nilai barang milik daerah secara tepat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur membuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pengelolaan aset melalui pemberian pelatihan secara berkesinambungan guna menambah *knowledge* dan *skill* bagi para pengelola asset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Maria, 2005, Manajemen Aset Pemerintah Daerah Studi Kasus di Kabupaten Pontianak, *Tesis S-2 Program.Pascasarjana UGM*. Yogyakarta.
- Djumara, Noorsyamasa. 2007. *Modul Prinsip-Prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah*. Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Ghozali, Iman. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hart-Sears, Terri. 2012. *Why Good Data Is A Must : Asset Management Oversight is Essential to Effective Governancem*, Edisi Pertama, U.S.A : ISG Specializing in Consumption Management Service.
- Hidayat, Muchtar. 2011. *Manajemen Aset (Privasi dan Publik)*. LaksBang. PRESSINDO, Yogyakarta.

- Hidayati, Siti Nur Rokhmah. 2016. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset RSUD Pandan Arang Boyolali*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jamaludin. 2017. *Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB*. Jurnal Manajemen Keuangan.
- Kuncoro, Mudrajat, 2009, *Metoda Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Edisi 3, Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2003. *Analisis Efektifitas Manajemen Aset Properti Riil Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001/2002)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 4(02): 1-9.
- Montayop, Pamfilia Ferdinanda, Westim Ratang, dan Arius Kambu. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel)*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Nasution, dkk. 2015. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara*. Jurnal Ekonomi, Vol 18. No. 11 Januari 2015.
- Pakiding, Yanuarius. 2006. *Hubungan Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)*. Tesis S2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Pamungkas, B., Fatchudin dan Kusumahdinata, A. 2011. *Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) Kaitannya dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Rengging.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduwan, 2006, *Metoda dan Tehnik Menyusun Tesis*. Alfabeta. Bandung.
- Sefiana, Eka . 2009. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di BEI*. Jurnal Riset Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Siddiq, Djauhar. 2008. *Definisi Pembelajaran*. Bandung : PT. Remaja.
- Siregar, Doli. D, 2004, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Standar Penilaian Indonesia (SPI). 2007. *International Valuation Standards (IVS)*, KPSPI. Jakarta.
- Sugiama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata : Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*, edisi pertama, Guardaya Intimarta. Bandung.
- Sugiyono, 2008, *Metoda Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis* Alfabeta. Bandung.
- Wardhana.I.H., 2005, *Mengelola Aset Kota Jakarta*, *Jurnal Kajian Pengembangan Perkotaan*, Vol 01, No. 01, April, halaman 7-10.
- , *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah*

*RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pegelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.*

-----, *Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah.*

-----, *Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.*

-----, *Peraturan Pemerintah RI
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.*

-----, *Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.*

-----, *Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.*

-----, *Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban, dan
Pengawasan Keuangan Daerah Serta
Tata Cara Penyusunan APBD.*